

Daftarisi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. LatarBelakang.....	1
B. MaksuddanTujuan.....	1
C. TugasdanFungsi.....	1
D. StrukturOrganisasi.....	6
Bab II Perencanaandan Perjanjian Kinerja	7
Bab III AkuntabilitasKinerja	8
A. Pengukuran Kinerja	8
B. Analisis Kinerja.....	8
C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Keberhasilan	16
D. Permasalahan/Hambatan	17
E. Solusi/Strategi Pemecahan Masalah	17
F. Realisasi Anggaran	18
G. Analisis Efisiensi	20
Bab IV Penutup	22

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan, berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisis dan pencapaiannya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Semoga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun berikutnya dapat terus mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (LPPD) Tahun 2019 oleh Badan Pendapatan Daerah masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkalis, Januari 2020
KEPALABADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

SUPARDI, S.Sos, MH
PEMBINA Tk I
NIP. 19710808 199703 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 3 tahun 2016. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 tahun 2016 yang mempunyai tugas diantaranya :

1. Perumusan kebijakan dibidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas sdm dibidang pendapatan daerah;
4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pendapatan daerah.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah di tandatangi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 6 (enam) indikator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2019. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari stake holder terkait.

Untuk tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berkomit untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

KEPALA

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah
2. Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
 - c. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
 - g. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan Pendapatan Daerah
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan kegiatan dan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan Pendaftaran.

2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran.

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran.

b. Sub Bidang Penilaian.

Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Penilaian.

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan Informasi.

BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan pembukuan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil.

b. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB.

Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang PBB-P2 dan BPHTB.

c. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan keberatan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan.

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan.

b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan pengurangan

c. Sub Bidang Pemeriksaan.

Sub Bagian Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pemeriksaan.

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang pengendalian dan pengembangan.

2. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan.

Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan pendapatan.

b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan.

Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pengembangan dan perundang-undangan.

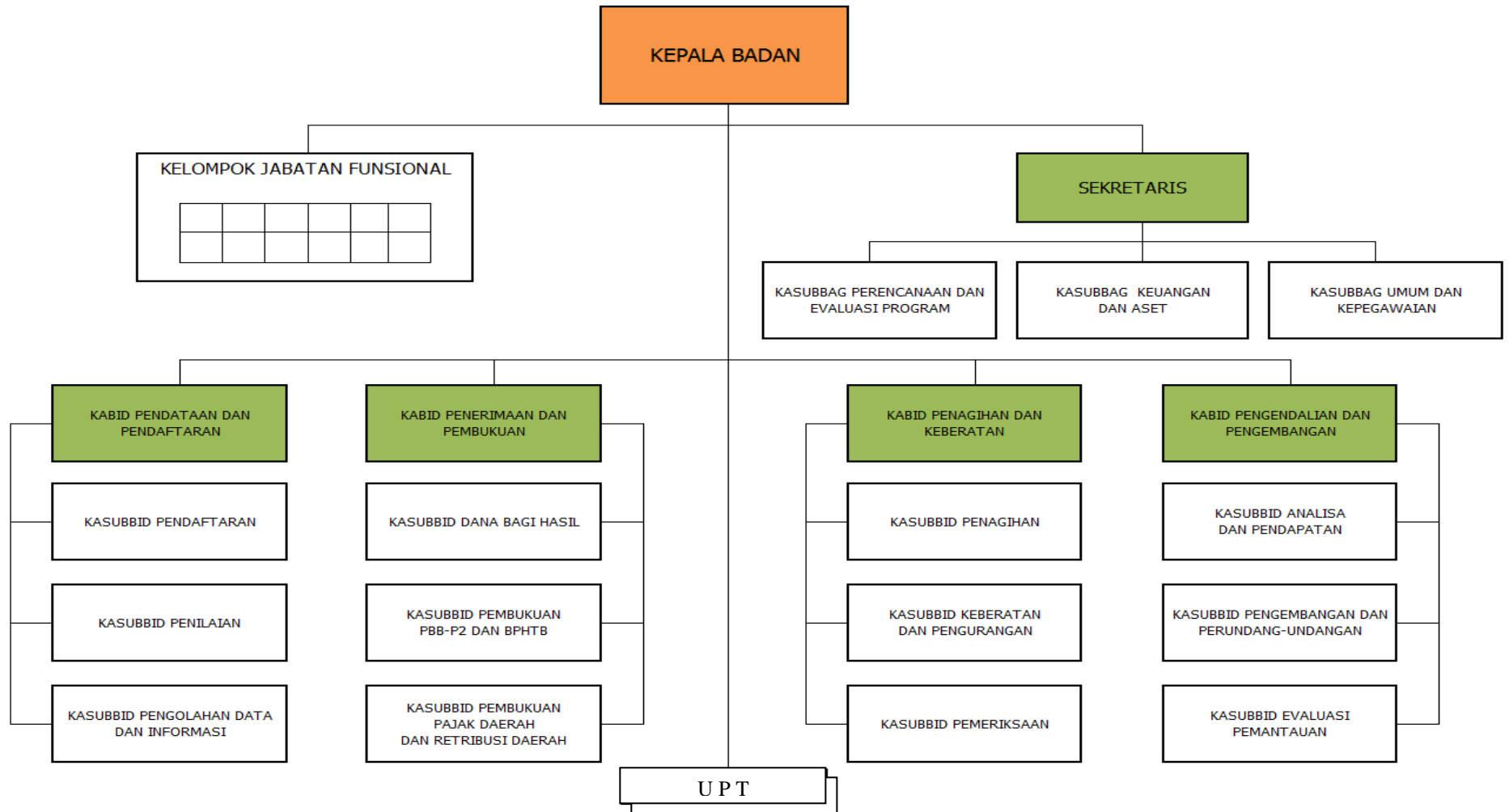
c. Sub Bagian Bidang Evaluasi Pemantauan

Sub Bidang Evaluasi Pemantauan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang evaluasi dan pemantauan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai perpanjangan Badan di Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. UPT PBB-P2
 - b. UPT Pendapatan Kecamatan Bengkalis
 - c. UPT Pendapatan Kecamatan Bantan
 - d. UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu
 - e. UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil
 - f. UPT Pendapatan Kecamatan Mandau yang mengkoordinir Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan
 - g. UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir yang mengkoordinir Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau
 - h. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert
 - i. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert Utara

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan melaporkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85%	90%	95%	95%
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Meningkatnya Penerimaan Daerah	• Persentase Peningkatan Pajak Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
		• Persentase non Pajak Pendapatan Asli Daerah	20%	40%	60%	80%	100%
Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	• Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	BB	BB
		• Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
2	Meningkatkan Penerimaan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	40%
		Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah Non Pajak Asli Daerah	40%
3	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

**Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	89%	94%
Meningkatkan Penerimaan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	60%	88%	70%
		76.562.680.690,58	66.854.523.376,25	
	Persentase Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah	60%	40%	61%
		393.405.834.198,34	156.624.002.131,13	
Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	Persentase Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 85\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan dapat dinilai dari segi Indeks Kepuasan Masyarakat yang bersumber dari pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Salah satu tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dalam administrasi dan pembayaran Pajak Daerah ikut berkontribusi untuk terus meningkatkan pelayanan yang dapat dilihat capainnya sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

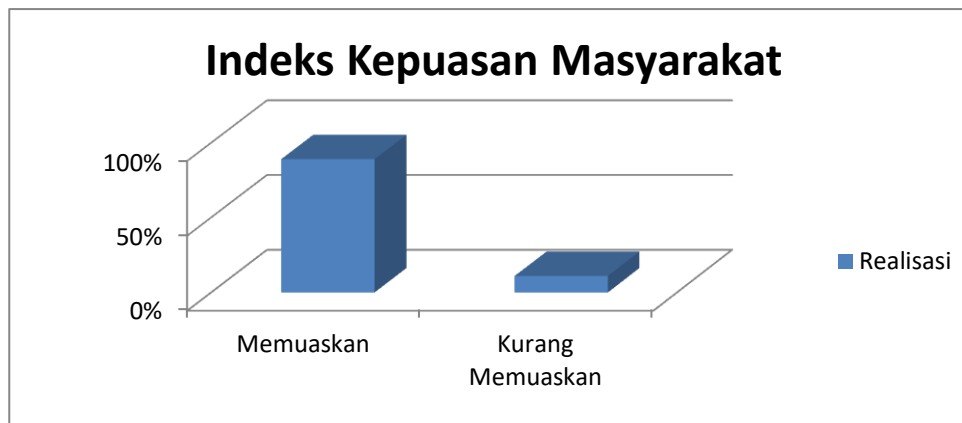
Indikator	2016	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	90%	89%	85%	94%

Di dalam penilaian indeks kepuasan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan dengan cara menyiapkan koin sebagai indikator untuk menentukan nilai kepuasan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Koin tersebut akan dimasukkan kedalam salah satu dari dua kotak yang telah disiapkan dengan masing-masing penilaian memuaskan dan kurang memuaskan. Dari koin-koin yang terkumpul dalam masing-masing kotak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

No	Nilai	WP Yang Memberikan Penilaian	Persentase
1	Memuaskan	1.266	89%
2	Kurang Memuaskan	156	11%
Jumlah		1422	100%

Grafik 3.1.
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan, jumlah sampel yang dikumpulkan dalam satu tahun terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 1.422 responden. Sebanyak 1.266 responden atau 89% memberikan penilaian Memuaskan dan 156 responden atau 11% memberikan penilaian kurang memuaskan.

2. Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Untuk melihat persentase Peningkatan Pajak Daerah, maka indikator ini mengambil data dari realisasi yang diterima pada tahun 2019, maka dengan itu indikator ini dapat di lihat keberhasilannya pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Indikator Capaian Kinerja Peningkatan Pajak Daerah

Indikator	2016	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	47.851.675.431,61	60%	88%	88%	70%
		76.562.680.690,58	67.046.859.434,39		

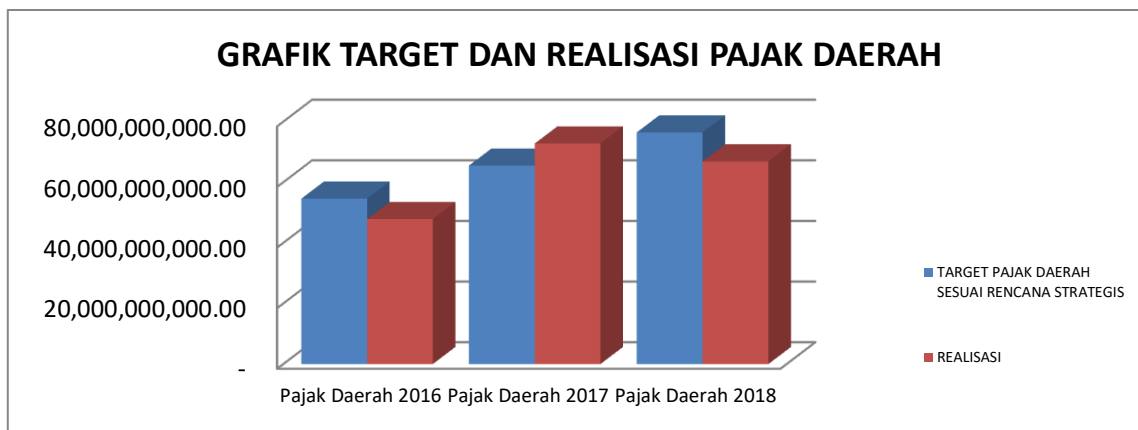
Dari tabel tersebut dapat di jelaskan kenaikan target Pajak Daerah untuk 2019 yaitu 60% dari awal penetapan pada tahun 2016 yakni Rp. 47.851.675.431,61 menjadi Rp. 76.562.680.690,58 dengan jumlah kenaikan 28.711.005.259 atau 60%. Dari target Pajak Daerah yang ditetapkan untuk tahun 2019, maka realisasinya sebesar 88% atau 67.046.859.434,39. Adapun untuk melihat jumlah peningkatan dan target pajak daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Target rencana strategis dan realisasi Pajak Daerah

NO	TAHUN	TARGET RENSTRA			REALISASI KINERJA TAHUNAN	
		KENAIKAN (%)	NOMINAL KENAIKAN	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	TAHUN 2016	-	-		47.851.675.431,61	
2	TAHUN 2017	20%	9.570.335.086	57.422.010.517,93	72.762.987.897,74	127%
3	TAHUN 2018	40%	19.140.670.173	66.992.345.604,25	66.854.523.376,25	99,79%
4	TAHUN 2019	60%	28.711.005.259	76.562.680.690,58	67.046.859.434,39	88%

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadinya peningkatan dan penurunan Realisasi Pajak Daerah dari tahun ke tahun, sedangkan target pajak daerah terus meningkat sebesar 20% pada tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2.
Target dan realisasi Pajak Daerah



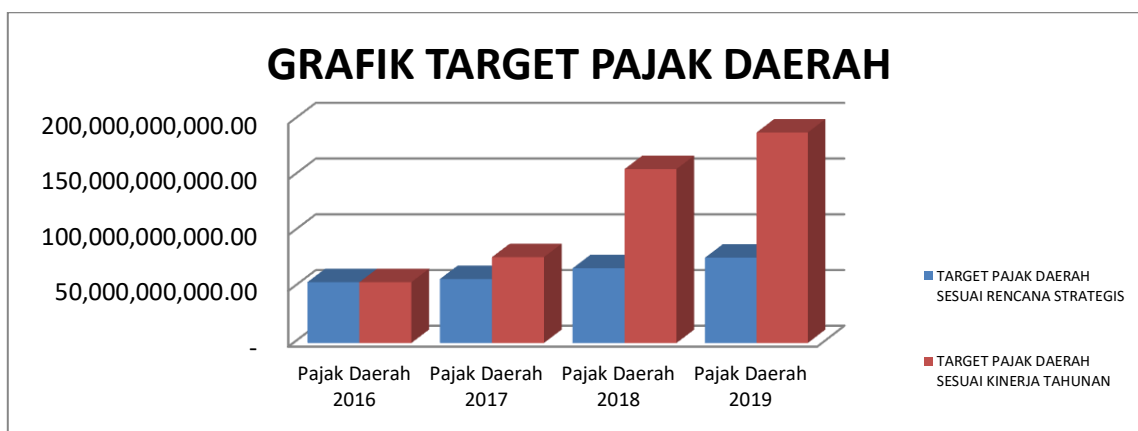
Selain hal tersebut di atas, dapat dibandingkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya :

Tabel 3.6.
Target dalam Rencana Strategis Dan Target Pajak setiap tahun

No	Penerimaan Pajak Daerah	Rencana Strategis			Target Pajak Daerah		
		Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target	Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target
1	Pajak Daerah 2016			47.851.675.431,61			54.580.000.000,00
2	Pajak Daerah 2017	20%	9.570.335.086,00	57.422.010.517,93	41,08%	22.420.000.000,00	77.000.000.000,00
3	Pajak Daerah 2018	40%	19.140.670.173,00	66.992.345.604,25	185,81%	101.415.000.000,00	155.995.000.000,00
4	Pajak Daerah 2019	60%	28.711.005.259,00	76.562.680.690,58	253,54%	138.220.000.000,00	188.800.000.000,00
5	Pajak Daerah 2020	80%	32.281.340.345,00	86.133.015.776,90	-	-	-
6	Pajak Daerah 2021	100%	47.851.675.432,00	95.703.350.863,22	-	-	-

Dari table di atas dapat di artikan kondisi penetapan target pada tiap tahunnya berbeda antara target pada Renstra dan target Pajak Daerah setiap tahunnya, hal ini disebabkan adanya perhitungan Potensi Pajak Daerah yang dapat lebih dioptimalkan sebagaimana yang bisa dijelaskan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2.
Perbandingan Target Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

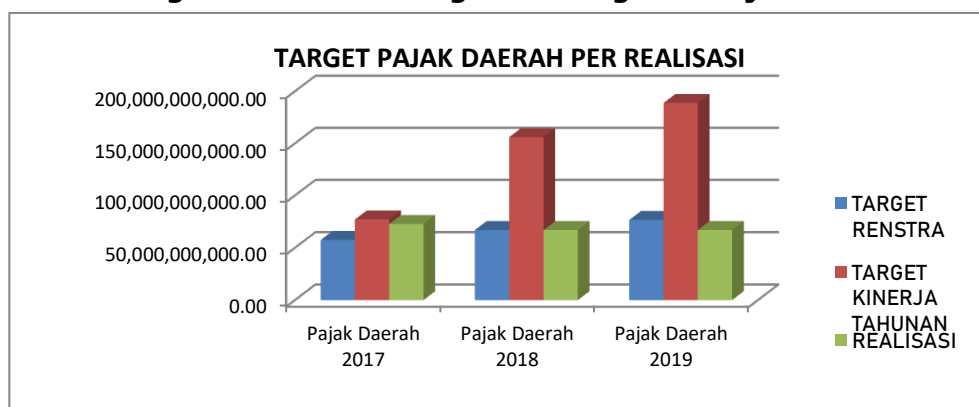


Dari Grafik di atas dapat disimpulkan target Pajak Daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, namun sampai akhir tahun anggaran 2019 belum bisa tercapai secara keseluruhan.

Tabel 3.7.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

NO.	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET DI RENCANA STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALISASI (Rp)
1	Pajak Daerah 2017	57.422.010.517,93	77.000.000.000,00	72.762.987.897,74
2	Pajak Daerah 2018	66.992.345.604,25	155.995.000.000,00	66.854.523.376,25
3	Pajak Daerah 2019	76.562.680.690,58	188.800.000.000,00	67.046.859.434,39

Grafik 3.3.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan



Realisasi Pajak Daerah ditahun 2019 jika dibandingkan dengan target Renstra yang telah ditetapkan realisasinya mencapai 88%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Pajak Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2019, realisasi Hanya 36%. Hal ini dapat disimpulkan tingginya penetapan target Pajak Daerah tahun 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

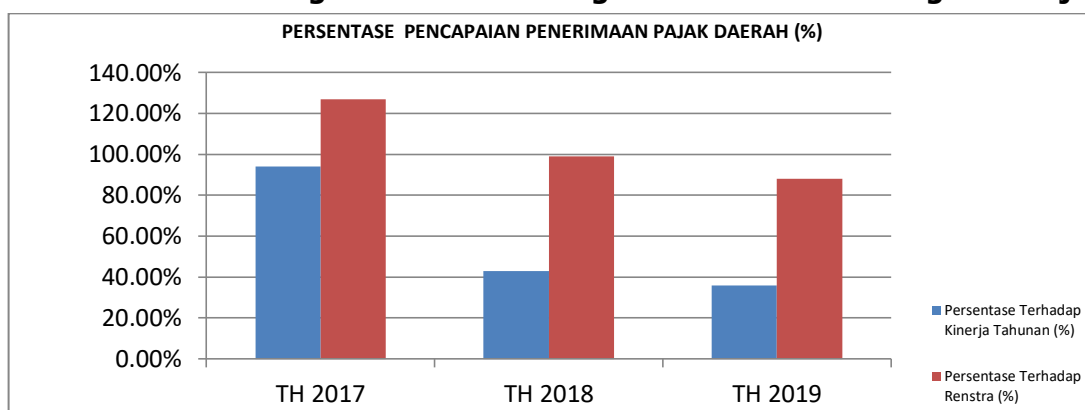
Tabel 3.8.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target Rencana Strategis dan Realisasi dihitung dalam persentase

No	Tahun	Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	57.422.010.517,93	72.762.987.897,74	127%	77.000.000.000,00	72.762.987.897,74	94%
2	2018	66.992.345.604,25	66.854.523.376,25	99%	155.995.000.000,00	66.854.523.376,25	43%
3	2019	76.562.680.690,58	67.046.859.434,39	88%	188.800.000.000,00	67.046.859.434,39	36%

Tabel 3.9.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Persentase Target Rencana Strategis dan Persentase Target Kinerja

NO.	Penerimaan Pajak Daerah	Capaian Terhadap Renstra	Capaian Terhadap Realisasi Tahunan
1	Pajak Daerah 2017	127%	94%
2	Pajak Daerah 2018	99%	43%
3	Pajak Daerah 2019	88%	36%

Grafik 3.4.
Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Persentase Target Rencana Strategis dan Persentase Target Kinerja



3. Indikator Persentase Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah

Yang termasuk Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Indikatornya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.10.
Indikator Capaian Kinerja Peningkatan Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah

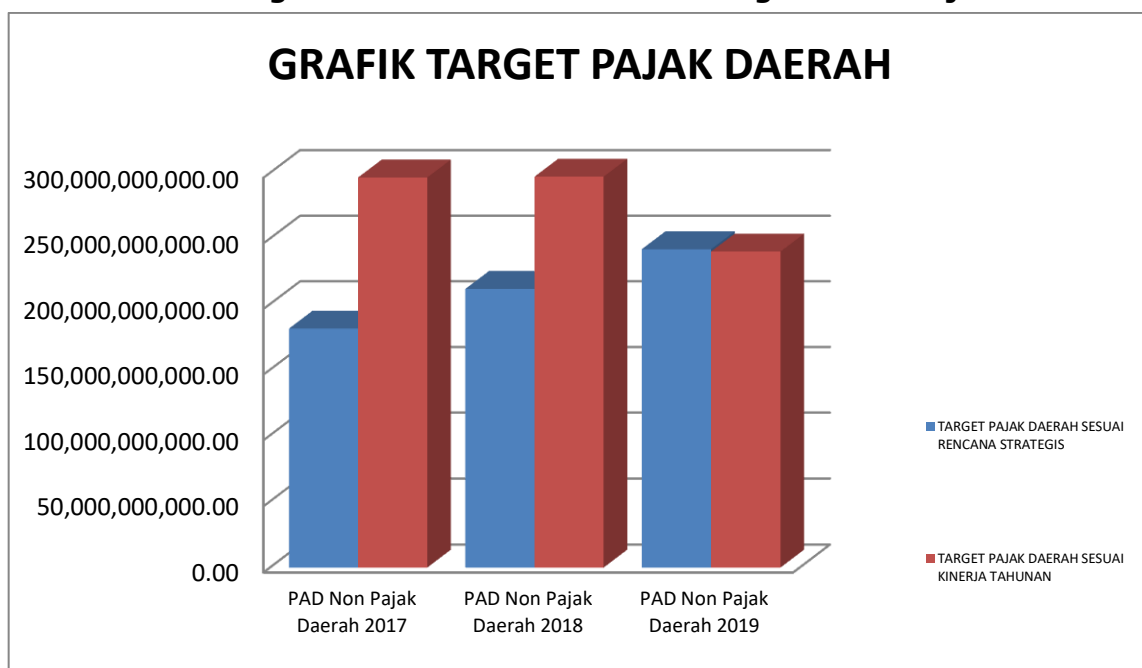
Indikator	2016	2019			Capaian 2019 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase (%) Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah	151.153.940.623,69	60 %	76 %	76 %	61 %
		241.846.304.997,90	184.700.302.791,53		

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan kenaikan target Non Pajak Pendapatan Asli Daerah untuk 2019 yaitu 60% dari 2016 dari jumlah Rp.151.153.940.623,69 menjadi Rp.241.846.304.791,53. Dari indicator Capaian Kinerja Penerimaan Non Pajak Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp. 184.700.302.791,53 atau 76%.

Tabel 3.11.
Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

No	Penerimaan Non Pajak Daerah Tahun	Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan		
		Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan	Target	Kenaikan Target dari 2016	Nominal Kenaikan/penurunan	Target
1	2016			281.004.167.284,53			281.004.167.284,53
2	2017	20%	30.230.788.124,74	181.384.728.748,43	6%	15.536.224.715,47	296.540.392.000,00
3	2018	40%	60.461.576.249,48	211.615.516.873,17	6%	16.141.961.715,47	297.146.129.000,00
4	2019	60%	90.692.364.374,21	241.846.304.997,90	-16,84 %	- 40.433.494.157,53	240.570.673.127,00
5	2020	80%	120.923.152.498,95	272.077.093.122,64	-	-	-
6	2021	100%	151.153.940.623,69	302.307.881.247,38	-	-	-

Grafik 3.5.
Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

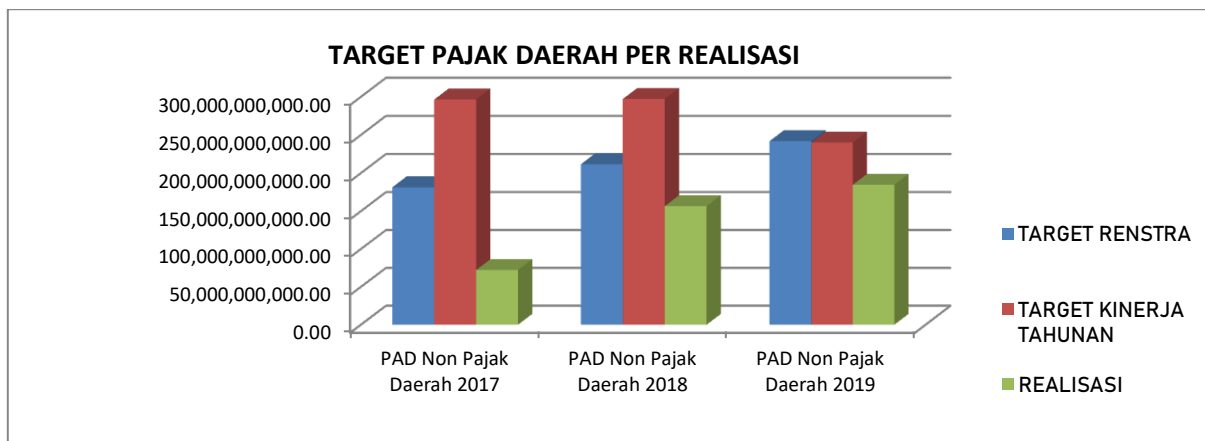


Berdasarkan gambaran grafik di atas, peningkatan target terhadap Rencana Strategis untuk tahun 2019 terjadi kenaikan 60% sedangkan target yang ditetapkan tahun 2019 terjadi Penurunan 0,75%.

Tabel 3.12.
Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

NO.	Tahun	TARGET RENCANA STRATEGIS	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALISASI (Rp)
1	2017	181.384.728.748,43	296.540.392.000,00	72.195.345.692,34
2	2018	211.615.516.873,17	297.146.129.000,00	156.624.002.131,13
3	2019	241.846.304.997,90	240.570.673.127,00	184.700.302.791,53

Grafik 3.6.
Realisasi Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Dari grafik diatas dapat dilihat target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, namun dari tahun ke tahun realisasinya belum mencapai target.

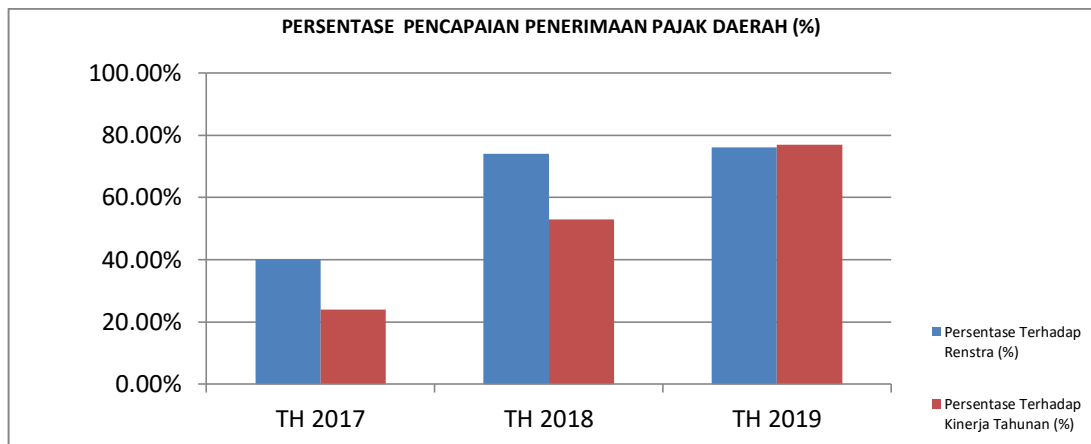
Tabel 3.13.
Realisasi Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan
Dihitung Dalam Persentase

No	Tahun	Rencana Strategis			Target dan Realisasi Tahunan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2017	181.384.728.748,43	72.195.345.692,34	40%	281.004.167.284,53	72.195.345.692,34	24%
2	2018	211.615.516.873,17	156.624.002.131,13	74%	296.540.392.000,00	156.624.002.131,13	53%
3	2019	241.846.304.997,90	184.700.302.791,53	76%	297.146.129.000,00	184.700.302.791,53	77%

Tabel 3.14.
Persentase Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan
Dihitung dalam Persentase

NO.	Tahun	Capaian Terhadap Renstra	Capaian Terhadap Kinerja Tahunan
1	2017	40%	24%
2	2018	74%	53%
3	2019	76%	77%

Grafik 3.7.
Persentase Penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk realisasi penerimaan Non Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, jika ukur dari capaian pada tahun 2016, realisasi ditahun 2019 ini meningkat sebesar 9%.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- ✓ Intensifikasi Perubahan Tarif pajak melalui Revisi Peraturan-peraturan yang berlaku.
- ✓ Ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan mendata jumlah wajib pajak baru yang melalui sosialisasi/penyuluhan.
- ✓ Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi.
- ✓ Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan kerjasama perbankan sehingga Masyarakat memudahkan untuk melakukan pembayaran.
- ✓ Koordinasi dan Komitmen Stackholder antar instansi yang cukup baik.
- ✓ Sosialisasi dan penyuluhan baik terhadap Wajib Pajak, maupun kepada aparat yang mengelola bidang PAD.
- ✓ Melakukan respon dengan cepat terhadap pelayanan dan permasalahan yang di hadapi.

D. Permasalahan/Hambatan

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan ataupun hambatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis masih memerlukan adanya perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Adanya beberapa kendala/hambatan yang perlu diantisipasi sejak dini, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi potensi yang ada.
- ✓ Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
- ✓ Sumber daya manusia yang sangat terbatas dan memiliki pendidikan yang kurang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Memberikan Prioritas Pengawasan terhadap kegiatan, program dan kebijaksanaan yang mempunyai bobot atau pengaruh besar terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan kegiatan, program dan kebijaksanaan lainnya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang keberhasilan kinerja. Termasuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi yang terkait dengan pengumpulan data hasil kinerja.
- ✓ Perlu koordinasi dan komunikasi yang intens kepada Badan atau Dinas terkait untuk membentuk strategi dalam menegakkan aturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

E. Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Menyikapi hal tersebut, dalam usaha untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun mendatang, perlu upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut antara lain adalah:

- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang disusun dapat mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- ✓ Peningkatan kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan.
- ✓ Melakukan koordinasi external kepada Dinas atau Badan yang kuat baik itu didalam melakukan pelaksanaan di lapangan, maupun secara administrasi yang terkait dengan penerimaan daerah baik itu didalam meliputi atas pemberian izin atau rekomendasi lainnya.

- ✓ Meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- ✓ Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan atau short course dan sosialisasi sistem yang baru.
- ✓ Meningkatkan sumberdaya manusia khususnya di bidang perpajakan baik dari segi pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi terhadap wajib pajak yang berdasarkan dengan aturan yang berlaku.
- ✓ Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

F. Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2019 telah menganggarkan dana sebesar Rp 45.726.684.550,00 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 21.728.628.236,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.998.056.314,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung yang terdiri dari 6 (enam) program dan 49 (Empat puluh sembilan) kegiatan.

Anggaran Belanja tidak Langsung sebesar Rp 21.728.628.236,00, reraealisasinya pada tahun anggaran tahun 2019 sejumlah Rp 14.908.474.294,00 atau mencapai 68,61 %. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 23.998.056.314,00 realisasinya tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 16.828.967.686,00 atau 70,13%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran terhadap Indikator Kinerja

NO	URAIAN	IDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	
					Rp.	%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
1	Pelayanan Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	1 Tahun	627.123.000,00	489.404.750,00	78,04 %

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

2	Penerapan Pajak Secara Online	Terlaksananya Penerapan Penerimaan Pajak Daerah Secara Online	1 Tahun	1.209.710.000,00	569.068.246,00	47,04 %
Sasaran : Peningkatan Penerimaan Daerah						
3	Koordinasi Penerimaan Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	1 tahun	.800.000.000,00	790.283.300,00	98,79 %
4	Penagihan dan penyisiran PBB	Meningkatnya Penerimaan Pajak PBB-P2 Kab. Bengkalis	1 tahun	537.348.000,00	298.315.000,00	55,52%
5	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	Jumlah Objek PBB yang terdata dalam 1 tahun	1 tahun	1.043.942.000,00	176.840.000,00	16,94%
6	Intensifikasi dan Stimulasi PBB	Jumlah wajib pajak yang melunasi PBB P2 tepat waktu yang diberikan dalam 1 tahun	1 tahun	811.069.000,00	781.061.000,00	96,30%
7	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak daerah dalam 1 tahun	1 tahun	539.960.000,00	330.900.000,00	61,28%
8	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 Pada Setiap Kelurahan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah SPPT PBB P2 yang Terdistribusi dalam 1 tahun	1 tahun	1.209.710.000,00	569.068.246,00	47,04%
9	Observasi dan Verifikasi data objek Pajak BPHTB	Jumlah Wajib pajak BPHTB yang diobservasi dan diverifikasi dalam 1 tahun	1 tahun	94.220.000,00	14.250.000,00	15,12%
10	Gerakan Taat Pajak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah	1 Tahun	1.040.627.000,00	717.447.000,00	68,94%
11	Pemukhtahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2	Terlaksananya Optimalisasi PBB-P2	5 (lima) Kecamatan	253.200.000,00	132.780.000,00	52,44%
12	Penagihan Pendapatan Asli Daerah	Frekuensi Penagihan terhadap tunggakan PAD dan Veivikasi administrasi pengelolaan penerimaan	100%	456.624.000,00	217.934.000,00	47,73%
13	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daelah	Terealisasinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Tahun	656.470.000,00	523.659.000,00	79,77%

14	Penertiban Pajak Daerah	Terlaksananya Pajak Daerah dalam Satu Tahun	1 Tahun	654.820.000,00	14.645.000,00	2,24%
15	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Disusun Dalam 1 Tahun	Wajib Pajak	805.425.000,00	696.005.624,00	86,41%
16	Koordinasi Penerimaan Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	1 tahun	800.000.000,00	790.283.300,00	98,79%
Sasaran : Penerimaan Non Pajak Pendapartan Asli Daerah						
17	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 tahun	440.055.000,00	320.952.000,00	72,93%

G. Analisis Efisiensi

Tabel 3.14.
Analisis Efisiensi Terhadap Anggaran dan Indikator Kinerja

NO	URAIAN	IDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		TINGKAT EFISIENSI
				Rp.	%	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
1	Pelayanan Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	627.123.000,00	489.404.750,00	78,04%	137.718.250,00
2	Penerapan Pajak Secara Online	Terlaksananya Penerapan Penerimaan Pajak Daerah Secara Online Untuk 2 Jenis Pajak Daerah	1.634.355.000,00	1.340.501.825,00	82,02%	293.853.175,00
Sasaran : Peningkatan Penerimaan Daerah						
3	Koordinasi Penerimaan Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	800.000.000,00	790.283.300,00	98,79%	9.716.700,00
4	Penagihan dan penyisiran PBB	Meningkatnya Penerimaan Pajak PBB-P2 Kab. Bengkalis	537.348.000,00	298.315.000,00	55,52%	239.033.000,00
5	Pendataan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	Jumlah Objek PBB yang terdata dalam 1 tahun	1.043.942.000,00	176.840.000,00	16,94%	867.102.000,00
6	Intensifikasi dan Stimulasi PBB	Jumlah wajib pajak yang melunasi PBB P2 tepat waktu yang diberikan dalam 1 tahun	811.069.000,00	781.061.000,00	96,30%	30.008.000,00

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

7	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak daerah dalam 1 tahun	539.960.000,00	330.900.000,00	61,28%	208.770.000,00
8	Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2 Pada Setiap Kelurahan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah SPPT PBB P2 yang Terdistribusi dalam 1 tahun	1.209.710.000,00	569.068.246,00	47,04%	544.721.500,00
9	Observasi dan Verifikasi data objek Pajak BPHTB	Jumlah Wajib pajak BPHTB yang diobservasi dan diverifikasi dalam 1 tahun	94.220.000,00	14.250.000,00	15,12%	79.970.000,00
10	Gerakan Taat Pajak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah	1.040.627.000,00	717.447.000,00	68,94%	101.610.000,00
11	Pemukhtahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2	Terlaksananya Optimalisasi PBB-P2	253.200.000,00	132.780.000,00	52,44%	120.420.000,00
12	Penagihan dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah	Frekuensi Penagihan terhadap tunggakan PAD dan Veivikasi administrasi pengelolaan penerimaan	456.624.000,00	217.934.000,00	47,73%	238.690.000,00
13	Verifikasi Penerimaan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rekon Data Pembukuan, Tunggakan Pajak dan retribusi Daerah	656.470.000,00	523.659.000,00	79,77%	132.811.000,00
14	Penertiban Pajak Daerah	Terlaksananya Pajak Daerah dalam Satu Tahun	654.820.000,00	14.645.000,00	2,24%	640.175.000,00
15	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Disusun Dalam 1 Tahun	805.425.000,00	696.005.624,00	61,6%	109.419.376,00
16	Koordinasi Penerimaan Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan dalam 1 Tahun	800.000.000,00	790.283.300,00	98,79%	9.716.700,00
Sasaran : Penerimaan Non Pajak Pendapartan Asli Daerah						
17	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	440.055.000,00	320.952.000,00	72,93%	119.103.000,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2019. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambar hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis diperoleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum sudah mencapai hasil yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Permasalahan yang dihadapi selama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus dicarikan solusi yang tepat guna menjawab permasalahan yang ada.
3. Anggaran / Dana sebagai pendukung yang tersedia dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan harus merealisasikan kebijakan yang dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan.


B. Saran - saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.

Bengkalis, Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,


SUPARDI, S.Sos. MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19710808 199703 1 006